



---

## UPAYA MITIGASI PASCA TSUNAMI DI DESTINASI PARIWISATA

Oleh

Shandra Rama Panji Wulung<sup>1)</sup> & Cep Ubad Abdullah<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

Email: [wulung@upi.edu](mailto:wulung@upi.edu)

### Abstrak

Destinasi pariwisata di Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam. Upaya mitigasi yang dilakukan pasca bencana menjadi suatu kewajiban bagi para pemangku kepentingan terkait, terutama pengelola destinasi pariwisata dan pemerintah setempat. Tanjung Lesung sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas menjadi kawasan yang terdampak Tsunami Selat Sunda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status bencana Tsunami Selat Sunda. Selain itu, diidentifikasi juga kondisi kebencanaan dan peran pengelola KSPN Tanjung Lesung dan pemerintah setempat dalam upaya mitigasi pasca Tsunami Selat Sunda. Metode kualitatif menjadi pendekatan penelitian ini dengan menetapkan KSPN Tanjung Lesung sebagai wilayah. Penelitian ini dilakukan pada Juli 2019 hingga Februari 2020 dengan pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lapangan, dan wawancara. Sedangkan pengumpulan data sekunder berupa informasi mitigasi bencana di KSPN Tanjung Lesung melalui studi literatur dan penelitian terdahulu. Metode kualitatif, isi, dan deskriptif menjadi metode analisis penelitian ini. KSPN Tanjung Lesung memiliki potensi bencana yang relatif tinggi diantara KSPN lainnya di Indonesia. Lokasinya berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau dan dilintasi oleh Cincin Api Pasifik, KSPN Tanjung Lesung menjadi rawan tsunami dan gempa bumi. Kondisi kebencanaan di KSPN Tanjung Lesung tidak lagi menjadi tanggung jawab PT. Banten West Java Tourism Development Center selaku pengelola kawasan tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan pemangku kepentingan yang mencakup pemerintah, pemerintah daerah, lembaga usaha, dan masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Destinasi Pariwisata, Pengurangan Risiko Bencana, Tsunami Selat Sunda & Tanjung Lesung

### PENDAHUALUAN

Keadaan memaksa atau *force majeure* merupakan suatu resiko ketidakpastian pada peristiwa yang dapat merugikan di masa depan dan menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan [1]. Indonesia terletak di deretan cincin gunung berapi dan merupakan bagian dari cincin api, hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan bencana alam seperti bencana tsunami, gunung api dan gempa bumi [2-4]. Selain bencana yang bersifat alami, terdapat juga bencana yang disebabkan oleh ulah manusia seperti kebakaran hutan dan banjir bandang [5,6]. Tingginya tingkat risiko bencana menjadikan Indonesia memiliki keunikan bentang alam, hal tersebut memicu dan berpeluang dikembangkannya destinasi pariwisata.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung menjadi salah satu dari sepuluh KSPN prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan masuk dalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Krakatau – Ujung Kulon dsk. Daya tarik wisata di KSPN Tanjung Lesung mayoritas berbasis alam diantaranya Pantai Tanjung Lesung, Pantai Bodur, Pantai Carita, Pulau Popole, dan Pulau Liwungan. Secara geologi dan geografis KSPN Tanjung Lesung terletak pada jalur cincin api pasifik dan kawasan rawan bencana tsunami, gempa bumi, dan banjir, hal tersebut didukung dengan kedekatan KSPN Tanjung Lesung dengan salah satu gunung api aktif yaitu Gunung Anak Krakatau.



Terjadinya bencana Tsunami Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018 dipicu oleh peristiwa pasang tinggi dan longsor bawah laut dari erupsi Gunung Anak Krakatau [7], bencana tersebut menyebabkan kerugian ekonomi dan menyebabkan efek domino berupa pembatalan kunjungan wisatawan menuju KSPN Tanjung Lesung [8,9]. Pentingnya mengembangkan sistem mitigasi menjadi tanggung jawab pengelola destinasi wisata, hal tersebut sebagai upaya dalam menghindari ketidaksesuaian ekspektasi yang diterima wisatawan dan meningkatkan persepsinya terhadap destinasi pariwisata [10,11]. Penelitian terdahulu terkait upaya mitigasi di KSPN Tanjung Lesung, diantaranya pengembangan Pulau Merak Kecil sebagai destinasi pariwisata pasca Tsunami Selat Sunda [12], kajian tentang pengelolaan KSPN Tanjung Lesung pasca bencana Tsunami Selat Sunda [13], membangun ketahanan masyarakat setempat pasca bencana di Selat Sunda [14], dan membangun kembali Tanjung Lesung sebagai destinasi pariwisata melalui program fotografi [15]. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status bencana Tsunami Selat Sunda dan mengidentifikasi kondisi kebencanaan di KSPN Tanjung Lesung. Selain itu, diidentifikasi peran pengelola KSPN Tanjung Lesung dan pemerintah setempat dalam upaya mitigasi bencana pasca Tsunami Selat Sunda.

## LANDASAN TEORI

### Konsep Penanggulangan Bencana

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, dibutuhkan pengelolaan bencana yang memitigasi (mengupayakan pencegahan) dan mereduksi

dampak yang ditimbulkan dari kejadian bencana. Sementara pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisatawan dilindungi oleh pemerintah selama melakukan aktivitas wisata di wilayah Indonesia.

Tindakan pencegahan bencana dapat dilakukan pada beberapa tahapan, mencakup tahapan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi. Lebih lanjut, tahapan pengurangan risiko bencana di destinasi pariwisata meliputi kegiatan sebelum bencana terjadi (mitigasi), kegiatan saat bencana terjadi (perlindungan dan evakuasi), kegiatan tepat setelah bencana terjadi (pencarian dan penyelamatan), dan kegiatan pasca bencana (pemulihan/ penyembuhan dan perbaikan/ rehabilitasi) [16–18]. Tindakan penanggulangan (berdasarkan waktu kejadian) dilakukan melalui empat tahapan utama yang mencakup mitigasi, kesiapsiagaan (prabencana), respon, dan pemulihan (pascabencana) [19–21].

Pemerintah merumuskan indikator dalam penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah yang meliputi jumlah korban, kerugian harga benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Sedangkan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Mitigasi bencana masuk dalam tahapan prabencana, kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruang; pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Terdapat tiga karakteristik yang memberikan wawasan tentang bagaimana bahaya memengaruhi kerentanan fisik dan sosial [22]. Pertama, karakteristik bahaya mengidentifikasi tingkat paparan bahaya alam di area tertentu. Kedua, kerentanan fisik yang meliputi jenis struktur, infrastruktur, dan lingkungan alami apa yang rentan terhadap kerusakan dan kerugian



berdasarkan interaksi antara ekposur dan karakteristik fisik. Ketiga, kerentanan sosial meneliti dampak bencana pada kelompok masyarakat dan jenis kerentanannya. Mengacu pada penjelasan tersebut, kerentanan di destinasi pariwisata pesisir dikategorikan menjadi risiko (zona bencana), fisik (struktur dan infrastruktur), dan sosial (wisatawan dan masyarakat setempat) [19].

### **Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Mitigasi**

Pemangku kepentingan didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi [23–26]. Pemangku kepentingan pada dasarnya memahami dan memprediksi perilaku dan tindakan para pemangku kepentingan dan menyusun strategi untuk secara etis dan efektif menangani mereka [27–29]. Memahami perilaku masing – masing pemangku kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan rencana pengurangan risiko bencana (PRB). Pemangku kepentingan mencakup masyarakat setempat, pengelola destinasi pariwisata, asosiasi pariwisata, perencana setempat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan industri pariwisata [30,31]. Model potensi kemitraan dalam rencana mitigasi mendeskripsikan terkait integrasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, respon, dan menunjukkan peran dan kesenjangan [32].

Faktor kunci keberhasilan mitigasi bencana adalah partisipasi pemangku kepentingan [30,33]. Keterlibatan pemangku kepentingan dan mengelola jaringan sangat penting dalam mitigasi karena mereka membangun kepercayaan, ketahanan, dan kinerja [34]. Pentingnya pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana adalah untuk meningkatkan kualitas rencana mitigasi bencana, untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan komprehensif, dan untuk meningkatkan pemahaman publik [35,35,36]. Keterlibatan pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam memperkuat kemampuan sosial dalam pengelolaan bencana [31,34,37].

Pendekatan proaktif dalam membangun keterlibatan pemangku kepentingan jauh lebih direkomendasikan dalam memperkuat ketahanan sosial dan budaya.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau kelompok yang dianggap sebagai suatu masalah sosial atau manusia dengan proses penelitian yang melibatkan beberapa pertanyaan dan prosedur serta analisis data secara induktif. Pada penelitian ini, fenomena yang dibahas adalah peran pengelola dan pemerintah setempat dalam mitigasi bencana pasca Tsunami Selat Sunda di KSPN Tanjung Lesung.

Penelitian ini dilakukan selama 8 bulan yang dimulai dari bulan Juli 2019 hingga Februari 2020 dan dilaksanakan di Kasawan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lapangan dalam memberikan penilaian kondisi lapangan; wawancara semi-struktur dengan para pemangku kepentingan terkait diantaranya pengelola KSPN Tanjung Lesung dan kelembagaan pemerintah yang membidangi kepariwisataan dan kebencanaan. Sedangkan pengumpulan data sekunder berupa informasi mitigasi bencana di KSPN Tanjung Lesung dengan cara *desk study* yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi dari berbagai dokumen kebijakan, pustaka, dan penelitian terdahulu. Penentuan subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini dilakukan dengan *metode purposive sampling* dan *snowball sampling*. Subjek penelitian ini mencakup pemerintah (BPBD Banten dan Pandeglang, Dinas Pariwisata Banten dan Pandeglang), dan pengelola KSPN Tanjung Lesung (PT. Banten West Java Tourism Development Corporation).



Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan metode analisis isi dan akan dilengkapi dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Data maupun informasi yang didapatkan dalam penelitian kemudian dilakukan perbandingan dan diuji pada konsep dan teori yang ada menggunakan prosedur analisis kualitatif melalui analisis data sebelum di lapangan, reduksi data, dan penyajian data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Kebencanaan di KSPN Tanjung Lesung

Terjadinya bencana Tsunami Selat Sunda menyebabkan kerugian ekonomi dan menyebabkan efek domino berupa pembatalan kunjungan wisatawan hingga 10 persen. Sebelum dilanda tsunami, tingkat hunian hotel dan

penginapan di kawasan wisata Anyer, Carita, dan Tanjung Lesung mencapai 80–90 persen. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 14 Januari 2018, terdapat beberapa informasi terkait bencana Tsunami Selat Sunda. Status tingkat bencana Tsunami Selat Sunda mencakup jumlah korban, kerugian harga benda, kerusakan prasarana dan sarana, dan cakupan wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan (Tabel 1).

Jauh sebelum terjadinya Tsunami Selat Sunda pada akhir tahun 2018, terdapat beberapa bencana yang melanda sekitar KSPN Tanjung Lesung mulai dari letusan Gunung Krakatau, tsunami, hingga gempa bumi. Berikut daftar bencana alam yang pernah terjadi di sekitar KSPN Tanjung Lesung.

**Tabel 1. Status tingkat bencana Tsunami Selat Sunda**

Indikator	Cakupan luas wilayah						Total
	Kabupaten	Pandeglang	Serang	Lampung Selatan	Pesawaran	Tanggamus	
Jumlah korban	Korban meninggal	296 jiwa	21 jiwa	118 jiwa	1 jiwa	1 jiwa	437 jiwa
	Korban menghilang	3 jiwa	-	7 jiwa	-	-	10 jiwa
	Korban luka-luka	16.712 jiwa	3.306 jiwa	11.810 jiwa	23 jiwa	92 jiwa	31.943 jiwa
	Mengungsi	7.792 jiwa	1.227 jiwa	6.999 jiwa	-	-	16.198 jiwa
	Total	24.803 jiwa	4.554 jiwa	18.934 jiwa	24 jiwa	93 jiwa	48.408 jiwa
Kerugian harta benda	Potensi risiko	Rp.15,67 T	Rp.221 M	Rp.3,9 T	Rp.30,4 M	Rp.303,6M	Rp.18,9 T
Kerusahan prasarana dan sarana	Rumah	611	30	30	134	4	807
	Hotel & villa	69	-	-	-	-	69
	Warung dan toko	60	-	-	-	-	60
	Kapal/ perahu	350	-	-	14	70	434
	Kendaraan	71	-	-	-	-	71
	Gardu	150	-	-	-	-	150
Dampak sosial dan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akomodasi tidak beroperasi/ tutup dikarenakan ansitipasi tsunami susulan dan tidak adanya kunjungan wisatawan</li> <li>Wisatawan yang telah melakukan pemesanan hotel untuk periode Natal dan Tahun Baru 2019 membatalkan kunjungannya, akibatnya tingkat hunian turun 10%</li> <li>Pihak akomodasi melakukan pengembalian uang pemesanan hotel atas arahan PHRI Banten</li> <li>Kondisi trauma yang dialami oleh nelayan untuk melakukan aktivitas mencari ikan di kawasan Selat Sunda</li> <li>Pasar pelelangan ikan tutup, hal tersebut dikarenakan belum adanya pasokan ikan dari nelayan</li> <li>Aksesibilitas menuju 6 desa (Cigorondong, Kertajaya, Sumberjaya, Tunggajaya, Ujungjaya, dan Kertamukti) terisolir karena jalan dan jembatan yang rusak.</li> </ul>						
Panjang pantai terdampak	Sepanjang 75,38 km di pesisir pantai Kabupaten Tanggamus; sepanjang 66,25 km di pesisir pantai Kabupaten Lampung Selatan; sepanjang 171,15 km di pesisir pantai Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Total keseluruhan sepanjang 312,78 km Panjang pantai terdampak.						



- Letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 yang menyemburkan abu vulkanik setinggi 80 km. Suara letusan terdengar ke timur sampai Australia dan Pulau Rodriguez di Kepulauan Samudera Hindia. Kejadian ini mengakibatkan tsunami setinggi 30 m yang menerjang pantai-pantai di Teluk Betung, Lampung, dan pesisir barat Jawa Barat dari Merak hingga Ujungkulon. Korban meninggal diduga sekitar 36.000 jiwa dan selama tiga hari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera tertutup hujan abu.
- Gempa bumi dengan magnitude 7,9 skala Richter terjadi pada tahun 1903.
- Gempa bumi berkekuatan 5,1 skala Richter di Selat Sunda pada Rabu, 3 Pebruari 2015, pukul 04.29 WIB dengan koordinat 6.18° LS dan 105.32° BT dan kedalaman 10 km.
- Tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 yang diakibatkan oleh erupsi yang memicu longsoran lereng Gunung Anak Krakatau seluas 64 Ha. Peristiwa tersebut mengakibatkan terjadinya air laut pasang dan memicu terjadinya tsunami.
- Gempa yang terjadi pada 2 Agustus 2019 pukul 19:03:21 WIB berpusat di koordinat 104,58° BT dan 7,54° LS, dengan magnitudo 7.4 skala Richter pada kedalaman 10 km di bawah permukaan laut, berjarak 137 km barat daya Sumur, Banten.
- Gempa tektonik dengan kekuatan 5,2 skala Richter pada 30 Oktober 2019, pukul 04:11:17 di Selat Sunda, tepatnya di koordinat 6,92°LS dan 105° BT dengan kedalaman 10 km.

Mengacu pada data Risiko Bencana Indonesia (RBI) yang dikeluarkan oleh BNPB, Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki risiko dampak terkena bencana tertinggi. Berdasarkan hasil adaptasi, dari total 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang terdapat di Indonesia [38], KSPN Tanjung Lesung berada di posisi pertama dengan memiliki skor indeks bencana tertinggi diantara destinasi pariwisata prioritas lainnya (Tabel 2).

**Tabel 2** Skor Indeks Risiko Bencana di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

Peringkat	Destinasi Pariwisata Prioritas	Skor	Kelas risiko
1	Tanjung Lesung	219	Tinggi
2	Bromo – Tengger – Semeru	195	Tinggi
3	Mandalika	168	Tinggi
4	Labuan Bajo	168	Tinggi
5	Morotai	166	Tinggi
6	Tanjung Kelayang	164	Tinggi
7	Borobudur	143	Sedang
8	Wakatobi	136	Sedang
9	Danau Toba	107	Sedang
10	Kepulauan Seribu	65	Sedang

Tingginya potensi bencana di KSPN Tanjung Lesung didukung dengan adanya peta sebaran daerah rawan tsunami yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan BPBD Banten. KSPN Tanjung Lesung masuk dalam zona rawan tinggi yang berpotensi mengalami bencana terparah jika terkena tsunami. Selain itu KSPN Tanjung Lesung sangat sangat dekat dengan sejarah terjadinya gempa bumi dengan magnitude 7-9 skala Richter. Selain rawan tsunami, di KSPN juga berpotensi terjadinya banjir. Peristiwa Tsunami Selat Sunda di akhir tahun 2018, banjir menjadi bencana bawaan setelah adanya peristiwa tsunami di malam hari. Hal tersebut mengindikasikan bahwa KSPN Tanjung Lesung sangat rawan terhadap tiga bencana utama yaitu tsunami, gempa bumi, dan banjir.

KSPN Tanjung Lesung memiliki potensi bencana yang relatif tinggi diantara KSPN lainnya di Indonesia. Tercatat dalam dua abad terakhir terdapat dua kali peristiwa tsumai di kawasan Selat Sunda yaitu pada tahun 1883 tahun 2018. Kedua letusan tersebut mengakibatkan gelombang tsunami yang berdampak terhadap sosial dan ekonomi, terutama di KSPN Tanjung Lesung. Kondisi kebencanaan di KSPN Tanjung Lesung tidak lagi menjadi tanggung jawab PT. Banten West Java Tourism Development Center selaku pengelola kawasan tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan pemangku kepentingan yang mencakup



pemerintah, pemerintah daerah, lembaga usaha, dan masyarakat setempat.

### **Peran Pengelola KSPN Tanjung Lesung dan Pemerintah Mitigasi Pasca Bencana**

Pariwisata di Indonesia merupakan industri yang rentan terhadap bencana dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Manajemen risiko bencana melibatkan berbagai pihak seperti pengelola destinasi pariwisata, pemerintahan, pelaku industri, akademisi, asosiasi pariwisata, dan masyarakat setempat yang terintegrasi antara satu sama lainnya. Dalam konteks kepariwisataan, pengelola kawasan pariwisata memiliki dua peran dalam manajemen risiko bencana, yaitu sebagai mitra kerja dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan sistem manajemen bencana yang terkoordinir sesuai prosedur dan rencana.

Adanya lembaga – lembaga yang bertanggung jawab langsung pada wilayahnya, diperlukan adanya otoritas yang dapat mengakomodir lembaga – lembaga tersebut. Pemangku kepentingan utama/ kunci di KSPN Tanjung Lesung mencakup PT. Banten West Java Tourism Development Corporation (BWJ-TDC), Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK), Balai Konservasi Sumber Daya (BKSDA) Lampung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang. Berikut penjelasan masing – masing peran pemangku kepentingan dalam upaya mitigasi bencana di KSPN Tanjung Lesung.

#### 1. PT. Banten West Java Tourism Development Center (PT.BWJ-TDC)

Pengelolaan KSPN Tanjung Lesung secara internal dikelola oleh PT. BWJ-TDC, hal tersebut sesuai arahan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung menjelaskan bahwa PT. Banten West Java

Tourism Development Corporation sebagai badan usaha pengusul telah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan Kawasan Tanjung Lesung sebagai kawasan ekonomi khusus, yaitu Zona Pariwisata. PT. BWJ-TDC, Jababeka Group, memiliki kuasa penuh dalam pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung. Peran PT. BWJ-TDC sebagai pengelola KSPN Tanjung Lesung dalam mitigasi bencana pasca Tsunami Selat Sunda diantaranya:

- Melakukan kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah II untuk upaya mitigasi bencana bagi kepariwisataan di KSPN Tanjung Lesung. Pihak BMKG memberikan sejumlah fasilitas berupa peralatan deteksi dini bencana di beberapa titik di KSPN Tanjung Lesung. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi dini bencana bagi wisatawan dan masyarakat sekitar selalu waspada terhadap bencana, terutama gempa bumi. Selain alat pendeteksi bencana gempa, BMKG juga telah mengaktifkan alat pemantau info dini bencana berupa radar tsunami di 18 titik lokasi, diantaranya wilayah Tanjung Lesung.
- Menyediakan beberapa titik kumpul dan jalur evakuasi. Jalur evakuasi menjangkau seluruh kawasan Tanjung Lesung, dengan durasi sekitar 10 menit dari area pesisir menuju titik kumpul. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan keamanan bagi wisatawan, sehingga aktivitas wisata bisa terus berjalan.
- Kesesuaian dengan arahan dokumen kebijakan (Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, pesisir KSPN Tanjung Lesung sudah menyesuaikan dengan arahan dokumen tersebut yaitu 100 meter dari tepi pantai.
- Merumuskan standar mitigasi bencana bersama Dewan Nasional KEK yang melibatkan para pakar, akademisi, dan instansi terkait.
- Perencanaan pembangunan tanggul pemecah ombak sebagai salah satu infrastruktur dalam



mitigasi bencana akibat air laut pasang atau tsunami.

- Melakukan evaluasi tata ruang bangunan di KSPN Tanjung Lesung sesuai dengan standarisasi pembangunan KEK tahan bencana.
- Melakukan pelatihan bagi para pegawai di KSPN Tanjung Lesung terkait literasi pengurangan risiko bencana.
- Melakukan sosialisasi terkait mitigasi bencana kepada wisatawan yang berkunjung ke KSPN Tanjung Lesung.
- Perencanaan dalam membangun penampungan di daerah perbukitan di KSPN Tanjung Lesung.
- Melakukan koordinasi dengan Balai Taman Nasional Ujung Kulon dalam penanggulangan bencana terkait aktivitas pariwisata, terutama di zonasi pemanfaatan untuk pariwisata di Pulau Panaitan (Legon Kadam, Legon Butun dan Legon Bajo), Pulau Peucang, Pulau Handeuleum dan Cibiuk.
- Melakukan koordinasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Lampung dalam literasi mitigasi bencana, khususnya pada wilayah Gunung Anak Krakatau

2. BNPB, BPPD Banten, dan BPPD Pandeglang KSPN Tanjung Lesung menjadi salah satu kawasan yang masuk dalam cakupan wilayah kerja BNPB, BPBD Banten, dan BPBD Pandeglang. Beberapa upaya mitigasi bencana pasca Tsunami Selat Sunda yang dilakukan BNPB, BPBD Banten, dan BPBD Pandeglang diantaranya:

- Sosialisasi terkait literasi pengurangan risiko bencana melalui media cetak yang menjelaskan berbagai bencana alam yaitu gempa bumi, kekeringan, tsunami, tanah longsor, dan banjir.
- Memberikan literasi dan langkah-langkah simulasi mitigasi bencana melalui buku saku dengan penjelasan dari setiap bencana alam.
- Mencanangkan tanggal 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana.

- Membangun dan mensosialisasikan kepada masyarakat akan kesiapsiagaan bencana.
- Menyiapkan tempat evakuasi sementara dan membangun jalur evakuasi.
- Membuat rambu-rambu evakuasi
- Memetakan zona rawan tsunami
- Pelatihan Sumber Daya Manusia, khususnya kepada para pegawai di KSPN Tanjung Lesung.

**Tabel 3 Upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Banten**

Bencana alam	Upaya Mitigasi Bencana
Gempa bumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila terjadi gempa bumi</li> <li>• Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan tersembunyi di bawah meja.</li> <li>• Menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan.</li> <li>• Membangun konstruksi yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat dan merenovasi bangunan</li> <li>• Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah</li> </ul>
Tsunami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketahui tanda – tanda sebelum tsunami terjadi, terutama setelah gempa bumi (intensitas gempa bumi lama dan terasa kuat, air laut surut, bunyi gemuruh dari tengah lautan, banyak ikan terdampar di pantai yang airnya surut, dan tanda – tanda alam lainnya)</li> <li>• Memantau informasi dari berbagai media resmi mengenai potensi tsunami setelah gempa bumi terjadi</li> <li>• Cepat berlari ke tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana untuk sementara waktu setelah gempa bumi mengguncang</li> <li>• Segera menjauhi pantai dan tidak perlu melihat datangnya tsunami atau menangkap ikan yang terdampar di pantai karena air surut.</li> <li>• Mengetahui tingkat kerawanan tempat tinggal akan bahaya tsunami dan jalur evakuasi tercepat ke daratan yang lebih tinggi.</li> </ul>
Erupsi gunungapi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperhatikan arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan perkembangan aktivitas gunungapi.</li> <li>• Siapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengatasi debu vulkanik</li> <li>• Mengetahui jalur evakuasi dan penampungan yang telah disiapkan oleh pihak berwenang</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan skenario evakuasi lain jika dampak letusan meluas di luar prediksi para ahli</li> <li>• Siapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, lampu senter, dan baterai cadangan, uang tunai yang cukup serta obat-obatan khusus.</li> </ul>
---

3. Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Daya tarik pesisir pantai barat Pulau Jawa masuk dalam wilayah Provinsi Banten, khusus untuk kawasan Anyer – Carita pengelolaannya di bawah Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Integrasi antara pengelola KSPN Tanjung Lesung dengan Dinas Provinsi Banten sangat diperlukan dalam mensinergiskan pengembangan kepariwisataan dan mitigasi bencana. Upaya mitigasi yang dilakukan berupa sosialisasi terhadap pelaku usaha seperti hotel, restoran, villa, dan toko-toko di sepanjang kawasan pasisir pantai.

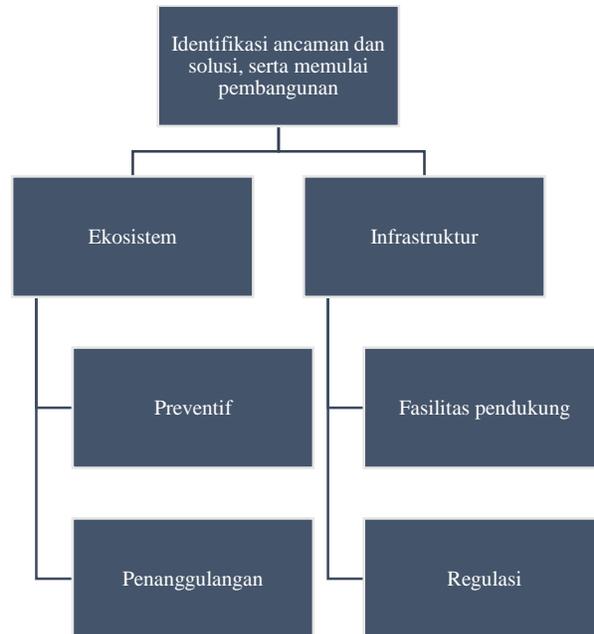
4. Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang

Masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang, Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang memiliki peranan penting dalam upaya mitigasi bencana di KSPN Tanjung Lesung. Lembaga ini memiliki berbagai rencana dalam mempersiapkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana di masa depan dengan tujuan untuk meminimalisasi jumlah korban. Salah satu upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang yaitu dengan melakukan perencanaan kawasan Ujung Kulon dan sekitarnya sebagai kawasan taman bumi atau lebih dikenal dengan sebutan *geopark*. Dalam mempersiapkan *Geopark* Ujung Kulon dan seluruh komponen masyarakat di dalamnya untuk menghadapi bencana yang mungkin akan datang perlu pendekatan secara holistik dan kerjasama seluruh pihak dalam pembangunan dan persiapan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Rangkaian persiapan dan strategi dalam mitigasi bencana yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan salah satunya dapat berupa keterlibatan langsung dan

bantuan sponsor pengadaan program/ kegiatan. Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang meliputi langkah indenfikasi ancaman dan memulai pembangunan baik itu aspek ekosistem dan infrastruktur (Gambar 1).

**Gambar 1 Upaya mitigasi bencana oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang**



**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi suatu kawasan yang diprioritaskan sebagai pusat perekonomian nasional dengan pariwisata sebagai sektor penggerak utamanya. Di sisi lain, di KSPN Tanjung Lesung dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana alam geologi, khususnya tsunami. Hal tersebut menjadi perhatian para pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana. Baik itu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang telah menetapkan peraturan penyelenggaraan bencana dan telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan



Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, dan BPBD Kabupaten Pandeglang. Di sisi lain selain mendapatkan hak perlindungan akan terjadinya bencana, peran masyarakat ikut serta dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di KSPN Tanjung Lesung. Hal tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha yang berkewajiban mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait upaya penanggulangan bencana di KSPN Tanjung Lesung. PT. Banten West Java Tourism Development Corporation selaku pengelola internal KSPN Tanjung Lesung memulai koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Banten dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pandeglang. Selain itu, pihak Dinas Pariwisata Provinsi Banten dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang ikut serta dalam upaya mitigasi melalui sosialisasi kepada pelaku industri pariwisata dan masyarakat pariwisata.

### Saran

Penetapan kebijakan kebencanaan telah dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam upaya mitigasi bencana. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) sebaiknya disusun dalam mendukung upaya mitigasi bencana, terutama pada tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang. Di sisi lain, PT. Banten West Java Tourism Development Corporation selaku pengelola KSPN Tanjung Lesung harus memiliki juga rencana terkait penanggulangan bencana. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi wisatawan yang berkunjung dan menjaga kredibilitas KSPN Tanjung Lesung, mengingat kedepannya kawasan tersebut sebagai destinasi pariwisata tingkat internasional

### DAFTAR PUSTAKA

[1] DuHadway, S.; Carnovale, S.; Hazen, B. Understanding risk management for intentional supply chain disruptions: risk

detection, risk mitigation, and risk recovery. *Ann. Oper. Res.* **2019**, *283*, 179–198.

- [2] Syiko, S.F.; Rachmawati, T.A.; Rachmansyah, A. Analisis Resiko Bencana Sebelum dan Setelah Letusan Gunung Kelud Tahun 2014 (Studi kasus di Kecamatan Ngantang, Malang). *J. Pembang. Dan Alam Lestari* **2014**, *5*, 22–29.
- [3] Wijaya, S.H.B. Disaster Journalism di Indonesia dalam Kritik. *J. Komun. Massa* **2014**, *7*, 77–84.
- [4] Akbar, R.; Darman, R.; Marizka, F.; Ardewati, N. Implementasi Business Intelligence Menentukan Daerah Rawan Gempa Bumi di Indonesia dengan Fitur Geolokasi. *J. Edukasi Dan Penelit. Inform.* **2018**, *4*, 30–35.
- [5] Charnley, S.; Poe, M.R.; Ager, A.A.; Spies, T.A.; Platt, E.K.; Olsen, K.A. A Burning Problem: Social Dynamics of Disaster Risk Reduction through Wildfire Mitigation. *Hum. Organ.* **2015**, *74*, 329–340.
- [6] Calkin, D.E.; Cohen, J.D.; Finney, M.A.; Thompson, M.P. How risk management can prevent future wildfire disasters in the wildland-urban interface. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **2014**, *111*, 746–751.
- [7] Cahyadi, F.D. *Sejarah Tsunami di Selat Sunda Sebagai Dasar Pembangunan Wilayah Pesisir Banten*; INA-Rxiv, 2019;
- [8] Alimsuardi, M.; Suprayogi, A.; Amarrohman, F., J. ANALISIS KERUSAKAN TUTUPAN LAHAN AKIBAT BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA DI KAWASAN PESISIR PANTAI KECAMATAN CARITA DAN KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG. *J. Geod. Undip* **2020**, *9*, 146–155.
- [9] Julius, A.M.; Anugrah, S.D.; Widana, I. Socialization for Private Sector of Hotel and Restaurant on Post Disaster of Tsunami in Banten, 2018. *J. Ilmu Pengetah. Sos.* **2019**, *6*, 548–533.
- [10] Rahmafitria, F.; Misran Disaster risk and travel decision of Middle Eastern tourists to



- natural destination in Indonesia. *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.* **2018**, 179, 012006.
- [11] Rittichainuwat, B.; Nelson, R.; Rahmafritria, F. Applying the perceived probability of risk and bias toward optimism: Implications for travel decisions in the face of natural disasters. *Tour. Manag.* **2018**, 66, 221–232.
- [12] Pratama, A.; Sulistyanto, N. Perancangan Identitas Visual Destinasi Wisata Pulau Merak Kecil Pasca Tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018. In Proceedings of the eProceedings of Art & Design; Telkom University, 2019; Vol. 6.
- [13] Wulung, S.R.P.; Abdullah, C.U.; Ervina, E. POST-DISASTER MANAGEMENT IN TOURISM DESTINATION: A CASE OF TANJUNG LESUNG, INDONESIA. In Proceedings of the Proceedings The 2019 International Conference on Culture, Technology, and Tourism (CTT); Prasetya Mulya Publishing: Tangerang, 2019; Vol. 1.
- [14] Shalih, O. *Membangun Ketahanan (Resiliensi) Bencana Pada Kawasan Pariwisata (Studi Kasus: Kabupaten Pandeglang Pasca Tsunami Selat Sunda 2018)*; INA-Rxiv, 2019;
- [15] Widodo, E. PELATIHAN FOTOGRAFI DENGAN MENGGUNAKAN KAMERA PONSEL PADA KELOMPOK SADAR WISATA, TANJUNG LESUNG, BANTEN. *Abdamas* **2019**, 1, 396–405.
- [16] Faulkner, B. Towards a framework for tourism disaster management. In *Managing tourist health and safety in the new millennium*; Routledge, 2013; pp. 175–196.
- [17] Faulkner, B. Towards a framework for tourism disaster management. *Tour. Manag.* **2001**, 22, 135–147.
- [18] Faulkner, B.; Vikulov, S. Katherine, washed out one day, back on track the next: a post-mortem of a tourism disaster. *Tour. Manag.* **2001**, 22, 331–344.
- [19] Nguyen, D.; Imamura, F.; Iuchi, K. Disaster Management in Coastal Tourism Destinations: The Case for Transactive Planning and Social Learning. *Int. Rev. Spat. Plan. Sustain. Dev.* **2016**, 4, 3–17.
- [20] Materson, J.H.; Peacock, W.G.; Van Zandt, S.S.; Grover, H.; Schwarz, L.F.; Cooper, J.T. *Planning for Community Resilience: A Handbook for Reducing Vulnerability to Disasters*; Island Press, 2014;
- [21] UNEP *Disaster Risk Reduction in Tourism Destinations*; United Nations Environment Programme, 2007;
- [22] Lindell, M.K.; Prater, C.; Perry, R.W. *Wiley pathways introduction to emergency management*; John Wiley & Sons, 2006;
- [23] Jones, T.M.; Wicks, A.C. Convergent Stakeholder Theory. *Acad. Manage. Rev.* **1999**, 24, 206–221.
- [24] Jones, T.M.; Wicks, A.C.; Freeman, R.E. Stakeholder Theory: The State of the Art. In *The Blackwell Guide to Business Ethics*; Bowie, N.E., Ed.; Blackwell Publishing Ltd: Oxford, UK, 2017; pp. 17–37 ISBN 978-1-4051-6477-1.
- [25] Miles, S. Stakeholder Theory Classification: A Theoretical and Empirical Evaluation of Definitions. *J. Bus. Ethics* **2017**, 142, 437–459.
- [26] Neumann, K.; Snoeren, P.M.; Stoelhorst, J.-W.; Mahoney, J.T.; Harrison, J.S.; Bosse, D.; Neumann, K.; Priem, R.L.; Snoeren, P.M.; Stoelhorst, J.-W.; et al. Value Creation from a Stakeholder Theory Perspective. *Acad. Manag. Proc.* **2019**, 2019, 15012.
- [27] Niekerk, M. van; Getz, D. *Event Stakeholders*; 1st ed.; Goodfellow Publishers, 2019; ISBN 978-1-911396-63-5.
- [28] Oppong, G.D.; Chan, A.P.C.; Dansoh, A. A review of stakeholder management performance attributes in construction projects. *Int. J. Proj. Manag.* **2017**, 35, 1037–1051.
- [29] *Relationships, communication, reporting and performance*; Andriof, J., Ed.; Unfolding stakeholder thinking; Greenleaf: Sheffield, 2003; ISBN 978-1-874719-53-3.
- [30] Mojtahedi, M.; Oo, B.L. Critical attributes for proactive engagement of stakeholders in disaster risk management. *Int. J. Disaster Risk Reduct.* **2017**, 21, 35–43.



- 
- [31] Granville, F.; Mehta, A.; Pike, S. Destinations, disasters and public relations: Stakeholder engagement in multi-phase disaster management. *J. Hosp. Tour. Manag.* **2016**, *28*, 73–79.
- [32] Chen, L.-C.; Liu, Y.-C.; Chan, K.-C. Integrated Community-Based Disaster Management Program in Taiwan: A Case Study of Shang-An Village. *Nat. Hazards* **2006**, *37*, 209–223.
- [33] *Destination marketing and management: theories and applications*; Wang, Y., Pizam, A., Eds.; CABI: Wallington, Oxfordshire, UK; Cambridge, MA, 2011; ISBN 978-1-84593-762-1.
- [34] Sloan, P. Redefining Stakeholder Engagement: From Control to Collaboration. *J. Corp. Citizsh.* **2009**, *36*, 25–40.
- [35] Champ, J.G.; Brooks, J.J.; Williams, D.R. Stakeholder Understandings of Wildfire Mitigation: A Case of Shared and Contested Meanings. *Environ. Manage.* **2012**, *50*, 581–597.
- [36] Roberts, R.M.; Jones, K.W.; Duke, E.; Shinbrot, X.; Harper, E.E.; Fons, E.; Cheng, A.S.; Wolk, B.H. Stakeholder perceptions and scientific evidence linking wildfire mitigation treatments to societal outcomes. *J. Environ. Manage.* **2019**, *248*, 109286.
- [37] Taylor, M.; Kent, M.L. Dialogic Engagement: Clarifying Foundational Concepts. *J. Public Relat. Res.* **2014**, *26*, 384–398.
- [38] BNPB *Indeks Risiko Bencana Indonesia*; Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 2013; ISBN 978-602-70256-0-8.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN